

*Seri Estetika*

# EKOLOGI

dalam Perspektif Sastra, Bahasa,  
dan Budaya



**Tim Editor:**

- Fransisca Tjandrasih Adji
- Almira Ghassani Shabrina Romala
- Chandra Halim
- Harris Hermansyah Setiajid

*Seri Estetika*

# EKOLOGI

**dalam Perspektif Sastra, Bahasa,  
dan Budaya**



**Tim Editor:**

- Fransisca Tjandrasih Adji
- Almira Ghassani Shabrina Romala
- Chandra Halim
- Harris Hermansyah Setiajid

## **Ekologi dalam Perspektif Sastra, Bahasa, dan Budaya**

### **Penulis:**

Almira Ghassani Shabrina Romala | Adventina Putranti  
Harris Hermansyah Setiajid | Anindita Dewangga Puri | Arina Isti'anah  
F.X. Risang Baskara | Praptomo Baryadi Isodarus | Dewi Widyastuti  
Maria Vincentia Eka Mulatsih | Ni Luh Putu Rosiandani | Novita Dewi  
Cesilia Sasanda Eka Putri Noveliana | Susilawati Endah Peni Adji  
Fransisca Tjandrasih Adji | Abednego Andhana Prakosajaya  
Chandra Halim | Florentinus Galih Adi Utama  
Silverio R.L. Aji Sampurno

### **Editor:**

Fransisca Tjandrasih Adji, Almira Ghassani Shabrina Romala,  
Chandra Halim, Harris Hermansyah Setiajid

### **Perwajahan sampul:**

ChatGPT Image Generation

### **Perwajahan isi dan tata letak:**

Harris Hermansyah Setiajid

Cetakan pertama, Agustus 2025  
xix + 269 hal, 15 x 21 cm  
ISBN 978-623-99711-9-9



Penerbit

**Jogja Literary Translation Club**

Griya Purwa Asri B-360, Purwomartani, Kalasan, Sleman 55571

Surel: [jltc.idn@gmail.com](mailto:jltc.idn@gmail.com)

[www.jltc.live](http://www.jltc.live)

bekerja sama dengan

**Pusat Kajian Budaya, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma**

Jl. STM Pembangunan No. 10, Mrican, Depok,

Sleman 55281

[www.usd.ac.id/fakultas/sastra/](http://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/)

# Daftar Isi

Daftar Isi .....	iii
Sekapur Sirih .....	v
Pengantar .....	xi
<b>EKOLOGI dan BAHASA .....</b>	<b>1</b>
Fostering Environmental Awareness Through the Children’s Storybook <i>Pilus Rumput Laut Untuk Rasi and Its English Translation</i> <i>Almira Ghassani Shabrina Romala .....</i>	<b>2</b>
The Background Knowledge Influence in the Interpretation of Natural Phenomena-Related Terms in Consecutive Interpreting Task <i>Adventina Putranti .....</i>	<b>23</b>
<i>Greenwashing dan Eco-Translation: Etika Penerjemahan dalam Komunikasi Lingkungan Korporasi</i> <i>Harris Hermansyah Setiajid .....</i>	<b>31</b>
Peran Pragmatik dan Humor untuk Menyampaikan Pesan Ekologis dalam Meme Lingkungan <i>Anindita Dewangga Puri .....</i>	<b>64</b>
“Air” dalam Wacana Perubahan Iklim: Kajian Ekolinguistik Berbantuan Korpus <i>Arina Isti’annah .....</i>	<b>78</b>
Mengubah Paradigma Pendidikan: Integrasi <i>Generative Artificial Intelligence</i> Melalui Pendekatan Ekologis <i>F.X. Risang Baskara .....</i>	<b>97</b>
Nama Bagian Tumbuhan sebagai Sumber Penciptaan Metafora dalam Bahasa Indonesia <i>Praptomo Baryadi Isodarus .....</i>	<b>117</b>
<b>EKOLOGI DAN SASTRA .....</b>	<b>125</b>

Developing Students' Ecological Awareness Through English as a Foreign Language (EFL) Creative Writing Practices <i>Dewi Widyastuti</i> .....	126
Perbandingan Aspek Ekologis dalam Dua Cerita Rakyat Kulon Progo: <i>Ngrandhu</i> dan <i>Sendang Mulyo</i> <i>Maria Vincentia Eka Mulatsih</i> .....	142
Upaya Merawat Bumi Melalui Cerita Anak <i>Ni Luh Putu Rosiandani</i> .....	152
Perubahan Iklim dan Sastra Peduli Lingkungan <i>Novita Dewi</i> .....	164
Hubungan Alam dan Manusia dalam Novel <i>Mata dan Rahasia Pulau Gapi</i> Karya Okky Madasari <i>Cesilia Sasanda Eka Putri Noveliana, Susilawati Endah Peni Adji, Fransisca Tjandrasih Adji</i> .....	171
<b>EKOLOGI DAN BUDAYA</b> .....	191
Penyebaran Agama Buddha di Maladewa dan Indonesia Berdasarkan Perspektif Ekologi <i>Abednego Andhana Prakosajaya</i> .....	192
Ekospiritual: Harmonisasi Alam dalam Kepercayaan Masyarakat Tionghoa Indonesia <i>Chandra Halim</i> .....	205
Sang Pemulih Tata Semesta: Studi Kasus Penanganan Irasional Wabah Penyakit di Vorstenlanden <i>Florentinus Galih Adi Utama</i> .....	230
Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal: Tradisi Sandung Masyarakat Dayak Kayong, Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Ketapang, Kalimantan Barat <i>Silverio R.L. Aji Sampurno</i> .....	247
<b>BIONARASI PENULIS</b> .....	260

# Sekapur Sirih

Pada dasarnya ada tiga jenis refleksi tentang nilai-nilai yang dianggap sebagai karakteristik manusia Indonesia (Wahid, 1981). Pertama, kalangan akademisi yang menilai budaya bangsa kita sebagai bangsa yang malas dan bersikap pasif di hadapan tantangan yang dibawa modernisasi. Kritikus sosial yang menganut model refleksi ini antara lain Mochtar Lubis, S. H. Alatas, dan Sutan Takdir Alisyahbana. Mereka menyalahkan hidup tradisional yang sudah berlangsung ratusan tahun dan diwarisi dari masa lampau, struktur pemerintahan yang tidak demokratis, keterbelakangan dalam segala bidang, dan kekuasaan politik yang begitu mutlak dari elit yang mampu memperoleh begitu banyak dari karya mereka yang tidak seberapa. Inilah refleksi paling menyayat dan terkadang naif untuk menanamkan semangat baru pada diri generasi muda.

Kedua, berbanding terbalik dengan kaum intelektual pertama, adalah pandangan yang sangat mengidealisasikan nilai-nilai luhur bangsa pada kedudukan yang diagungkan sebagai prinsip normatif yang membawa bangsa Indonesia kepada masyarakat yang adil, makmur, dan modern. Masyarakat Indonesia dinilai sebagai bangsa pencinta damai, sopan dan ramah kepada orang lain, rajin bekerja tanpa kehilangan daya meditasi dan refleksi, sabar, dan tekun di dalam membangun negaranya menuju masyarakat adil dan makmur. Selama Orde Baru, nilai-nilai luhur bangsa ini paling gencar diindoktrinasi melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Idealisasi yang sering kekanak-kanakan atas 'nilai-nilai luhur bangsa' ini seringkali berbenturan dengan kondisi satiris bangsa yang seringkali jauh dari kenyataan empiris. Dalam kenyataan, korupsi yang merajalela telah menggerus nilai kejujuran, pembantaian dan penyiksaan terhadap sesama anak bangsa yang tak berdosa berlangsung tanpa pembelaan dari kaum intelektual

yang mendewakan nilai kesatriaan, hiangnya keberanian moral kaum cendekiawan menghadapi rezim-rezim tidak demokratis.

Pandangan ketiga adalah pandangan yang tumbuh di kalangan akademisi. Mereka melakukan kajian-kajian empiris untuk menemukan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan bertahan dari perubahan-perubahan radikal yang terjadi di dalam masyarakat. Saya menilai, para akademisi --termasuk para penulis di dalam buku ini-- mengidentifikasi dan mendeseminasikan nilai, sikap, dan pandangan-pandangan budaya yang masih hidup di dalam masyarakat tanpa pretensi menganggapnya sebagai nilai yang sangat agung dan luhur. Mereka mampu menguji, membuktikan premis-premis dan klaim-klaim budaya luhur bangsanya tanpa kehilangan daya kritisnya. Sebagai akademisi, mereka tidak memiliki beban sosial-historis untuk membuang nilai-nilai berorientasi lama yang sudah usang dan menggantinya dengan nilai-nilai yang lebih peka terhadap perubahan dan modernitas.

Aspek yang penting di dalam analisis bahasa, sastra, dan budaya bukan saja fakta dan fenomenanya tetapi juga sudut pandang tentang fenomena tersebut. Ini berarti kita memandang fenomena bahasa, sastra, dan budaya dalam suatu perspektif tertentu. Buku ini menawarkan perspektif yang beragam tentang ekologi melalui kajian bahasa, sastra, dan budaya. Secara keseluruhan, buku ini mengandung kritik terhadap kerusakan lingkungan dan mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Buku ini menyajikan model refleksi yang ketiga, yakni refleksi kritis kalangan akademisi yang mempelajari bidang ilmu bahasa, sastra, dan budaya. Kebanyakan peneliti memotret fenomena sosial budaya daerah tertentu dengan menggunakan perspektif akademis di bidang ilmu yang ditekuni para penulisnya sendiri. Hasil-hasil studi akademis ini memberikan gambaran kepada pembaca tentang situasi sosial sebuah fenomena.

Para ahli lingkungan menegaskan bahwa lingkungan hidup kita sudah dirusak secara masif dan brutal oleh manusia. Kerusakan itu mencakup lingkungan fisik (*physical environment*),

lingkungan biologis (*biological environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*) (Taum, 2022). Kerusakan alam menyebabkan kerusakan degeneratif dari lingkungan-lingkungan tersebut melalui menurunnya kualitas maupun kuantitas aset alam seperti air, tanah, dan udara termasuk ekosistem, intrusi habitat, pembasmian satwa liar, dan pencemaran lingkungan. Perubahan nyata dalam lingkungan hidup itu benar-benar tidak diinginkan. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran lingkungan, longsor dan banjir.

Kerusakan lingkungan yang sangat mengancam kehidupan semua makhluk hidup digambarkan oleh Rachel Carson dalam bukunya *Silent Spring*. Buku ini menyuarakan ketertindasan alam dari kaum kapitalis yang mengeksploitasi alam, terutama berkenaan dengan penggunaan pestisida secara berlebihan untuk membasmi hama di Amerika Serikat. Lihat juga uraian Cate Lineberry “How Rachel Carson's 'Silent Spring' Awakened the World to Environmental Peril Carson's 1962 bestseller first warned the public about the devastating effects of chemical pesticides—and started a revolution.

Penggunaan pestisida berakibat kerusakan ekosistem dan hancurnya ekologi. Banyak burung didapati mati atau menghilang, mata rantai ekosistem terputus, dan manusia sendiri terdampak kanker. Buku itu selanjutnya memberikan pengaruh besar terhadap regulasi di Amerika. Beberapa negara bagian kemudian melarang penggunaan bahan kimia tertentu untuk melindungi alam dari kehancuran.

Sepuluh tahun kemudian, sebuah peristiwa eksploitasi alam kembali menggugah kepedulian manusia atas pentingnya kelestarian alam. Di tahun 1972, di Colorado, AS, sebuah perusahaan bermaksud kembali memabat hutan untuk dijadikan resort<sup>1</sup>. Kali ini muncul tokoh bernama Profesor Christopher D.

---

<sup>1</sup> Christopher D. Stone, 2010. *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment* Oxford: Oxford University Press.

Stone –seorang ahli hukum– yang menentang eksploitasi alam itu. Alam seolah mengucapkan keinginannya melalui Stone. Bagaimana caranya agar suara alam terdengar oleh hakim di pengadilan? Stone menulis artikel, “*Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*” (1972). Perdebatannya berkisar pada pertanyaan apakah pohon memiliki hak untuk pergi ke pengadilan dan membela dirinya *before the law* bahwa dia tidak ingin ditebang?

Hal ini adalah sebuah fenomena baru yang mengejutkan karena pada waktu itu pohon bukan subyek hukum. Pohon tidak memiliki hak untuk membela dirinya. Tradisi hukum kita bersifat antroposentris. Diskusi dan perdebatan hukum yang panjang akhirnya memunculkan teori: *Legal Standing* –sebagai dasar hukum lingkungan. *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak dikatakan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, apakah pohon mempunyai *legal standing*? Dari perdebatan itu muncullah teori perwalian. Pohon mempunyai hak hukum melalui pengampunya/walinya. Teori perwalian digunakan di dalam sistem hukum. Pohon memiliki wali/ampu, komunitas pengampu hutan, yaitu masyarakat adat. Pohon tidak mempunyai mulut untuk memberikan kesaksian, tetapi dia dapat diwakilkan.

Sejak saat itu muncullah persoalan hak etis lingkungan di dalam konsep etika kepedualian (*ethics of care*). Langit memiliki hak untuk jernih. Laut memiliki hak untuk biru. Pohon memiliki hak untuk tidak ditebang. Burung memiliki hak untuk bersarang di atas pohon. Inilah *new kind of ethics* yang menghadirkan egalitarianisme baru. Dasar teorinya keadilan lingkungan (*environmental justice*).

Fakta menunjukkan bahwa umat manusia menjadi spesies yang terancam berbagai macam bencana, penyakit, dan kelaparan akibat kerusakan lingkungan yang sangat cepat dan terus menerus. Hutan-hutan terus menghilang. Gurun pasir

semakin meluas. Setiap tahun miliaran ton tanah subur dibawa oleh banjir ke laut. Banyak spesies lain, baik flora maupun fauna, juga terancam punah. Laut, sungai, dan air tanah tercemar. Lapisan ozon dirusak dan pemanasan global memunculkan berbagai ancaman bencana.

Buku ini menawarkan sudut pandang akademisi dalam memahami fenomena sosial budaya, sastra, dan bahasa khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Para penulis, yang merupakan pakar di bidang bahasa, sastra, dan budaya, menggunakan pengetahuan mereka untuk menganalisis dan menginterpretasi berbagai permasalahan lingkungan dan memberikan solusi terbaik untuk mengatasinya.

Dengan sukacita saya menyambut kehadiran buku *Ekologi dalam Perspektif Sastra, Bahasa, dan Budaya* ini dan mempersembahkannya sebagai kontribusi penting dari Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya terkait dengan isu lingkungan hidup.

Buku ini juga hadir sebagai respons terhadap peringatan Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'*, yang menegaskan pentingnya perawatan bumi dan perlunya kebersamaan dalam melawan krisis ekologi. Melalui pendekatan humaniora, para penulis di dalam buku ini menawarkan wawasan baru dalam memandang ekologi, tidak hanya sebagai masalah ilmiah yang berbicara dalam ranah biologi, tetapi juga sebagai persoalan sosial, budaya, dan nilai kemanusiaan.

Dalam *Laudato Si'*, Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan "rumah bersama" kita yang sedang berada dalam ancaman, baik dari perubahan iklim, kerusakan alam, hingga ketidakadilan sosial yang sering kali disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Buku ini, dengan cermat, menggali hubungan ekologi dengan bahasa, sastra, dan budaya—tiga bidang yang sangat relevan dalam menyuarakan kesadaran ekologis dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Para penulis menggali teks-teks sastra yang

mengangkat tema lingkungan, memanfaatkan bahasa sebagai sarana penyebaran kesadaran lingkungan, serta menelusuri kearifan lokal yang mengajarkan kita bagaimana hidup harmonis dengan alam.

Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, dengan komitmennya terhadap nilai-nilai kritis dalam pendidikan, memahami bahwa sastra dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang kita terhadap dunia dan lingkungan di sekitar kita. Buku ini bukan hanya sekadar kajian akademik, melainkan sebuah seruan untuk bertindak—untuk mengembalikan perhatian kita pada nilai-nilai ekologi yang ada dalam bahasa, sastra, dan budaya kita. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berpegang pada prinsip integritas dan keadilan sosial, Fakultas Sastra turut mengambil bagian dalam upaya ini dengan mengedepankan pemahaman lintas disiplin yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Semoga buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk lebih peka terhadap perubahan lingkungan dan mendorong tindakan nyata untuk menjaga bumi kita, seperti yang tercermin dalam karya-karya sastra yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Dalam semangat *Laudato Si'*, marilah kita bersama-sama merawat dan melindungi bumi sebagai rumah bersama, demi generasi yang akan datang.

**Yoseph Yapi Taum**

Dekan Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

# Pengantar

Perubahan iklim atau yang lebih sering dikatakan sebagai pemanasan global adalah kondisi bumi yang semakin memanas suhunya dan hal ini sudah tidak asing bagi manusia. Musim kemarau yang semakin panjang dengan suhu yang semakin meningkat serta musim hujan yang semakin pendek periodenya namun semakin tinggi intensitasnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kekeringan, gagal panen, krisis pangan dan air bersih, banjir dan longsor, wabah penyakit tropis, dsb. Perubahan iklim jelas menyengsarakan kehidupan umat manusia. Kerugian materi dan juga korban nyawa adalah akibat yang harus diterima. Oleh karena itu, sudah saatnya kita, pemerintah, industri dan masyarakat, bahu-membahu berupaya untuk menghambat terjadinya perubahan iklim. Meiviana dan kawan-kawan (2004) dalam bukunya yang berjudul *Bumi Makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia* mencermati persoalan perubahan iklim ini. Dalam buku itu diungkapkan sebab akibat perubahan iklim dan upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah dengan menjaga hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, yang disiplin ilmunya disebut dengan ekologi.

Masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, jika mendengar istilah ekologi ada kecenderungan berpikir itu adalah ranah pembicaraan orang yang menggeluti disiplin ilmu-ilmu eksakta, terutama biologi, kehutanan, pertanian. Orang akan heran jika mereka yang berlatar belakang disiplin ilmu-ilmu humaniora, apalagi bidang bahasa, sastra, dan budaya berbicara tentang ekologi. Para penulis buku ini berlatar belakang bahasa, sastra, dan budaya. Namun demikian, mereka memiliki perhatian dalam dunia ekologi dengan mencermatinya melalui kacamata bahasa, sastra, dan budaya. Buku Seri Estetika ini mengandung

harapan bagi semua lapisan masyarakat untuk terus merawat bumi demi kelestarian lingkungan. Dengan dasar itu pulalah Buku Seri Estetika terbitan perdana yang merupakan buku bunga rampai dengan judul *Ekologi dalam Perspektif Sastra, Bahasa, dan Budaya* ini ditulis.

Buku ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama merupakan bagian yang membahas keterkaitan ekologi dengan bahasa. Dalam bagian pertama ini terdapat tujuh tulisan yang disampaikan oleh Almira Ghassani Shabrina Romala, Adventina Putranti, Harris Hermansyah Setiajid, Anindita Dewangga Puri, Arina Isti'anah, F.X. Risang Baskara, dan Praptomo Baryadi Isodarus. Tulisan-tulisan mereka menunjukkan bahwa bidang bahasa pun memiliki peran dalam mengungkapkan persoalan ekologi.

Almira Ghassani Shabrina Romala mencermati penerjemahan buku cerita anak *Pilus Rumput Laut untuk Rasi* ke dalam bahasa Inggris dengan fokus pada metode penerjemahan yang digunakan untuk menyampaikan pesan kesadaran lingkungan. Mengacu pada teori metode penerjemahan Newmark, Almira Ghassani Shabrina Romala berusaha menunjukkan bahwa metode komunikatif dan semantik sering diterapkan untuk memastikan pesan dalam teks sumber dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca anak-anak dalam bahasa sasaran. Metode komunikatif digunakan untuk menyederhanakan struktur kalimat dan menjadikan narasi lebih alami dalam bahasa Inggris, sementara metode semantik mempertahankan keakuratan makna, terutama pada elemen penting seperti tema lingkungan. Dalam tulisan ini, Almira Ghassani Shabrina Romala menegaskan pentingnya penerapan metode penerjemahan yang tepat untuk menyampaikan pesan edukatif secara efektif kepada audiens internasional.

Adventina Putranti membahas fase konversi saat penerjemah ada dalam posisi mendengarkan, menghafal, dan mengubah pesan. Pembahasan difokuskan pada pengetahuan penafsir yang mempengaruhi pilihan kata atau ungkapan yang

digunakan dalam penyampaian materi. Hasil pembahasan Adventina Putranti menunjukkan bahwa pengetahuan juru bahasa dapat mempengaruhi pilihan kata ketika mengubah pesan BSu menjadi BSa selama proses penafsiran. Demikian halnya ketika menafsirkan istilah-istilah yang berkaitan dengan alam. Penafsir mengasosiasikan istilah-istilah tersebut dengan istilah-istilah yang umum digunakan dalam BSa yang biasa ditemukan dalam situasi geografis BSa. Dengan demikian penafsir masih memerlukan paparan lebih banyak mengenai istilah-istilah terkait bahaya alam dan bencana alam dari berbagai situasi geografis untuk memperkaya kosa kata mereka.

Selanjutnya, Harris Hermansyah Setiajid mengupas secara kritis hubungan antara praktik *greenwashing* dan peran penerjemahan dalam konteks ekologi, dengan fokus khusus pada dinamika yang terjadi di Indonesia. *Greenwashing*, yakni upaya perusahaan membangun citra ramah lingkungan secara manipulatif, seringkali diperkuat melalui teks-teks yang diterjemahkan tanpa kajian kritis. Di sinilah peran penerjemah menjadi strategis, bukan sekadar sebagai penyampai bahasa, melainkan sebagai aktor yang menentukan bagaimana makna ekologis dipertahankan atau bahkan diselewengkan. Harris menyoroti bahwa banyak penerjemahan korporat di Indonesia masih terjebak pada reproduksi narasi hijau yang sebenarnya bersifat semu dan menyesatkan. Tanpa kesadaran ekologis, penerjemah berpotensi menjadi bagian dari mata rantai *greenwashing* itu sendiri. Dengan mendasarkan analisis pada data dan studi kasus nyata di Indonesia, Harris mengajak pembaca untuk melihat penerjemahan sebagai kerja ekologis yang bertanggung jawab dan berdampak langsung pada masa depan bumi.

Anindita Dewangga Puri mengamati fenomena maraknya meme di internet secara khusus yang menyinggung isu ekologi. Dalam hal ini, meme menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan pesan atau kritik tentang perubahan iklim, polusi, konservasi, dan lain sebagainya. Menurut Anindita Dewangga

Puri, isu-isu terkait lingkungan sering sulit untuk dicerna oleh khalayak umum karena banyak menggunakan konsep dan data yang kompleks. Dengan alasan itu, Anindita Dewangga Puri berpendapat bahwa meme dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan terkait isu-isu lingkungan. Namun demikian, perlu penggunaan elemen visual dan linguistik yang sederhana salah satunya yaitu meme yang berbalut humor. Selain mudah diakses oleh khalayak umum, meme yang berbalut humor dapat menghibur sekaligus berperan penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan nyata pada masyarakat untuk mengatasi isu-isu lingkungan.

Dalam tulisannya tentang ekolinguistik, Arina Isti'annah memfokuskan pemikirannya pada leksem "air" sebagai elemen integral dalam ekosistem. Menurut Arina Isti'annah, iklim dapat diketahui dari kualitas dan kuantitas air yang berpengaruh terhadap kehidupan organisme dalam ekosistem, termasuk pemanasan global. Menghadapi hal seperti ini, media massa Indonesia tidak secara eksplisit mengungkap aktor sosial yang paling berperan dalam peningkatan suhu bumi. Media massa Indonesia cenderung mengaburkan faktor antroposentris dalam wacana iklim. Pemberitaan perubahan iklim di Indonesia masih bersifat ambivalen. Hal ini berdampak pada kurangnya informasi dan pengetahuan yang secara langsung melibatkan pembaca. Akibatnya, terjadilah pelanggaran wacana iklim yaitu penerimaan fenomena perubahan iklim yang berdampak buruk terhadap organisme dan ekosistem sebagai bencana, bukan sebagai krisis yang memerlukan mitigasi nyata dari seluruh elemen masyarakat.

F.X. Risang Baskara berbicara tentang ekologi dalam kaitannya dengan teknologi Generative AI (GAI) dan dunia pendidikan. Pendekatan ekologis yang menekankan keterkaitan antara teknologi, guru, siswa, dan lingkungan pendidikan secara holistik dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan kontekstual, serta memperkuat interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan belajar mereka.

Namun demikian, menurut FX. Risang Baskara integrasi GAI dalam pendidikan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan etis dalam proses pembelajaran serta isu privasi dan keamanan data siswa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak - pengembang teknologi, pendidik, pembuat kebijakan, dan komunitas pendidikan - untuk memastikan bahwa inovasi ini diterapkan dengan cara yang menghargai dan mendukung ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Dengan memahami dan menghormati keterkaitan antara manusia, teknologi, dan lingkungan belajar, dapat dibentuk masa depan pendidikan yang lebih cerah, adil, dan manusiawi.

Praptomo Baryadi Isodarus mencermati nama-nama tumbuhan dan bagian-bagiannya dalam kaitannya dengan penciptaan seni verbal. Nama berbagai tumbuhan dan bagian-bagiannya menjadi inspirasi bagi orang untuk menciptakan berbagai bentuk seni verbal, seperti puisi, cerita, perumpamaan, peribahasa, idiom, dan metafora. Secara khusus, Praptomo Baryadi Isodarus mengkaji nama bagian tumbuhan yang meliputi *akar, pohon, cabang, ranting, daun, bunga, dan buah* sebagai unsur pembentuk berbagai konstruksi bahasa yang bermakna metaforis. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa nama bagian tumbuhan yang paling produktif sebagai unsur pembentuk konstruksi yang bermakna metaforis adalah kata *buah*.

Bagian kedua buku ini menghadirkan lima artikel tentang sastra dalam kaitannya dengan ekologi, yang ditulis oleh Dewi Widyastuti, Maria Vinensia Eka Mulatsih, Ni Luh Putu Rosiandani, Novita Dewi, dan dan Cesilia Sasanda Eka Putri Noveliana (bersama Susilawati Endah Peni Adji dan Fransisca Tjandrasih Adji),

Menurut Dewi Widyastuti, menulis kreatif berpotensi mengembangkan kesadaran siswa terhadap lingkungan sekitar, seperti permasalahan ekologi. Dengan dukungan pendamping, siswa dapat menggambarkan keprihatinan terhadap lingkungan mereka. Tulisan Dewi Widyastuti ini mengeksplorasi kegiatan pengembangan kesadaran ekologis siswa melalui praktik menulis

kreatif. Hasil tulisan siswa menggambarkan keunikan pengamatan mereka terhadap kondisi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fakta-fakta di lingkungan sekitar mendorong siswa untuk sadar akan ekologi.

Maria Vincensia Eka Mulatsih melakukan penelitian terhadap dua ceritera rakyat daerah Kulon Progo yang memuat unsur ekologis yaitu cerita rakyat berjudul *Sendang Mulyo* dan *Ngrandhu*. Aspek ekologis dua cerita tersebut dibandingkan dengan tujuan mendalami nilai-nilai terkait hubungan manusia dengan alam. Nilai-nilai yang tercermin dalam kedua cerita rakyat tersebut merupakan cerminan cara pandang masyarakat tentang hubungan manusia dan alam. Cerita rakyat *Sendang Mulyo* menekankan bahwa manusia bukanlah entitas utama dan kehadirannya merupakan implikasi dari alam. Cerita rakyat *Ngrandhu* mengungkapkan penghargaan terhadap alam yang memberi manusia segala kebutuhannya. Di akhir tulisannya, Maria Vincensia Eka Mulatsih berharap aspek ekologis dalam cerita rakyat dapat menjadi materi pembelajaran bagi generasi muda agar semakin memahami budaya dan peduli dalam pelestarian lingkungan.

Selanjutnya, Ni Luh Putu Rosiandani melontarkan gagasan pentingnya pembentukan karakter dan perilaku peduli lingkungan melalui ceritera anak. Menurut Ni Luh Putu Rosiandani, cerita anak yang memuat gagasan lingkungan hidup, akan menjadikannya efektif dalam menyampaikan pengetahuan dan menumbuhkan kepekaan tentang persoalan lingkungan hidup. Selain itu, dapat pula memunculkan dorongan pada anak untuk berperan dalam aksi nyata merawat lingkungan hidup.

Dalam tulisannya yang berjudul “Perubahan Iklim dan Sastra Peduli Lingkungan”, Novita Dewi berpendapat bahwa karya sastra Indonesia semakin banyak mengangkat isu lingkungan, khususnya ketidakadilan yang dialami masyarakat adat akibat kerusakan ekosistem. Novita Dewi mencontohkan hal itu dalam pengamatannya terhadap novel *Burung Kayu*. Novel *Burung Kayu* menggambarkan adanya konflik agraria dan

eksploitasi sumber daya alam yang merenggut hak-hak hidup masyarakat adat. Sebagai bentuk seni imajinatif, *Burung Kayu* secara kreatif dan kritis menggugah kesadaran budaya cinta lingkungan dan kewaspadaan terhadap perubahan iklim. Di akhir tulisannya, Novita Dewi menegaskan bahwa sastra tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga wahana untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan sosial.

Dalam pengamatan terhadap novel *Mata dan Rahasia Pulau Gapi*, Cesilia Sasanda Eka Putri Noveliana bersama Susilawati Endah Peni Adji dan Fransisca Tjandrasah Adji menjelaskan bahwa hubungan alam dan manusia terjalin secara biosentris dan ekosentris. Dalam rangka mengupayakan hubungan tersebut, masyarakat mengusahakan berbagai upaya untuk menjaga, mencegah, dan melingungi lingkungan alam yang menjadi tempat mereka hidup. Narasi-narasi sejarah hubungan manusia dan alam menjadi pengingat masyarakat bahwa alam akan memberikan hukuman bagi manusia yang merugikannya. Dengan demikian, suatu tindakan bentuk persuasif dapat mengingatkan manusia akan konsekuensi yang bisa diterimanya jika mengganggu alam.

Bagian ketiga dalam buku ini memuat empat tulisan tentang budaya yang berkaitan dengan ekologi. Tulisan-tulisan tersebut mendasarkan pada kearifan local etnis-etnis tertentu. Gagasan-gagasan tentang budaya dan ekologi dalam bagian ini diungkapkan oleh Abednego Andhana Prakosajaya, Chandra Halim, Florentinus Galih Adi Utama, dan Silverio RL Aji Sampurno.

Abednego Andhana Prakosajaya menjelaskan penyebaran agama Buddha di Indonesia dan Maladewa yang menunjukkan adanya keidentikan. Penyebaran agama Buddha baik di Indonesia maupun Maladewa yang didasarkan pada motivasi ekonomi pada kenyataannya merupakan sebuah proses dinamika ekologis antara masyarakat dengan lingkungannya. Abednego Andhana Prakosajaya berpendapat bahwa determinisme lingkungan dalam perspektif ekologis sebagai pemicu munculnya perdagangan yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana dan media bagi

Buddhisme untuk memperluas pengaruhnya dan diterima dengan baik di Indonesia dan Maladewa.

Chandra Halim membicarakan tentang spiritualitas tentang pentingnya harmonisasi hubungan alam dan manusia dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Doktrin agama Tao, Khonghucu, maupun Buddha yang dianut oleh mayoritas orang Tionghoa di Indonesia menegaskan bahwa alam merupakan tempat tinggal yang sejati. Hal ini semakin digaungkan dengan semangat ekospiritual di berbagai negara. Ekospiritual menghayati bahwa untuk mengatasi isu-isu lingkungan seperti kemusnahan spesies hewan atau binatang tertentu, pemanasan global, dan eksploitasi alam secara berlebihan, manusia harus menyadari perilaku dan tanggungjawab spiritualnya terhadap bumi. Ekospiritual lebih pada sebuah 'pertobatan ekologis' yang lebih bersifat spiritual yang menyuarakan keprihatinan terhadap permasalahan alam dan lingkungan. Di akhir tulisannya, Chandra Halim menegaskan bahwa harmonisasi alam akan selalu terjaga dan kesucian hati manusia juga tidak akan mudah ternoda.

Florentinus Galih Adi Utama mencermati beberapa karya sastra Jawa dalam kaitannya dengan upaya penguasa bersama rakyat menanggulangi terjadinya wabah penyakit di lingkup Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Terjadinya wabah penyakit mengakibatkan ketidakseimbangan tata dunia. Untuk memulihkannya, raja atau pemimpin tidak bergerak seorang diri. Ia membutuhkan peran aktif rakyat. Raja dituntut harus memiliki sifat-sifat ideal kepemimpinan seturut tradisi Jawa. Ia harus mampu mengetahui akar permasalahan yang sedang dialami oleh rakyatnya. Salah satu cara yang dikehendaki rakyat untuk menanggulangi wabah adalah dengan perarakan benda pusaka istana. Florentinus Galih Adi Utama menegaskan bahwa prosesi perarakan benda pusaka memperlihatkan kemanunggalan antara raja dengan rakyat, baik dari visi maupun misi. Hal ini menunjukkan adanya harapan akan keseimbangan dapat segera terjadi yang ditandai dengan meredanya wabah penyakit dan minimnya korban jiwa.

Silverio R.L. Aji Sampurno berbicara tentang konservasi hutan melalui pemanfaatan kearifan lokal masyarakat Dayak Kayong, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak Kayong adalah Sandung. Sandung adalah bangunan kecil yang terbuat dari kayu ulin yang memiliki fungsi sebagai persemayaman orang yang telah meninggal. Menurut Silverio RL Aji Sampurno, sandung mempunyai potensi besar sebagai alternatif perlindungan hutan sebagai bagian dari tradisi Dayak Kayong. Keberadaan sandung berpengaruh langsung terhadap kelestarian kawasan hutan di sekitarnya melalui penghormatan spiritual terhadap leluhur dan alam. Dengan demikian, pelestarian kearifan local sandung Dayak Kayong berdampak pada pelestarian hutan dan ekologi.

Tim Editor mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Mahapengasih atas penyertaan-Nya sehingga Buku Seri Estetika edisi perdana ini bisa diterbitkan. Terima kasih Tim Editor ucapkan kepada para penulis yang di tengah kesibukan dengan senang hati menyumbangkan tulisan. Tim Editor mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma yang telah bersedia memberi sambutan atas terbitnya buku ini. Terima kasih pula Tim Editor ucapkan kepada *Chief Organizing Officer* Jogja Literary Translation Club atas dedikasinya dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Selamat membaca!

**Tim Editor**



# **EKOLOGI dan BAHASA**





# ***Greenwashing* dan *Eco-Translation*: Etika Penerjemahan dalam Komunikasi Lingkungan Korporasi**

**Harris Hermansyah Setiajid**

*Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra  
Universitas Sanata Dharma*

## **A. Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menjadi perhatian utama di panggung global. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan degradasi ekosistem menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Salah satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah praktik *greenwashing* (pencucian hijau), yaitu upaya perusahaan atau institusi untuk memberikan citra palsu tentang komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan. *Greenwashing* kerap dilakukan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*), iklan, atau siaran pers yang memanipulasi fakta agar tampak seolah-olah suatu perusahaan peduli lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian.

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sekaligus sebagai salah satu paru-paru dunia karena keberadaan hutan hujan tropisnya, turut menjadi pusat perhatian dalam perbincangan global tentang lingkungan. Sayangnya, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Menurut data Global Forest Watch (2022), Indonesia kehilangan sekitar 9,75 juta hektar tutupan pohon antara tahun 2001 hingga 2021, dengan puncaknya pada tahun 2016 saat



terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut yang masif. Salah satu penyebab utama deforestasi adalah ekspansi industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang sering kali dibarengi dengan praktik pembakaran lahan.

Dalam situasi seperti ini, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, khususnya di sektor agribisnis dan energi, kerap menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Laporan ini umumnya tersedia dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk menjangkau pemangku kepentingan lokal maupun global, termasuk investor internasional yang semakin memperhatikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam keputusan investasi mereka. Laporan keberlanjutan menjadi dokumen penting yang mempengaruhi reputasi perusahaan di mata dunia.

Namun, banyak dari laporan keberlanjutan tersebut diduga mengandung unsur *greenwashing*. Greenpeace dalam laporannya yang berjudul "Licence to Clear: The Dark Side of Permitting in Indonesia's Palm Oil Sector" (2021) menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia masih terlibat dalam deforestasi meskipun telah berkomitmen pada kebijakan 'No Deforestation, No Peat, No Exploitation' (NDPE). Laporan ini mengungkap bahwa lebih dari 600 ribu hektar hutan telah dibuka oleh pemasok perusahaan-perusahaan besar sejak komitmen NDPE pertama kali dicanangkan pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara narasi dalam laporan keberlanjutan dan praktik nyata di lapangan.

Fenomena *greenwashing* ini tidak hanya menjadi persoalan komunikasi korporasi tetapi juga masalah etika dan keadilan ekologis. Ketika perusahaan menggambarkan dirinya sebagai pelindung lingkungan melalui laporan yang



diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, mereka sebenarnya sedang membentuk opini global tentang bagaimana isu lingkungan ditangani di negara berkembang seperti Indonesia. Di sinilah penerjemahan memainkan peran strategis yang sering diabaikan.

Penerjemahan dokumen keberlanjutan, baik dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris maupun sebaliknya, tidak sekadar proses alih bahasa. Penerjemahan berkontribusi pada pembentukan citra perusahaan secara internasional. Oleh karena itu, peran penerjemah menjadi sangat penting dalam menentukan bagaimana realitas lingkungan Indonesia direpresentasikan kepada dunia. Proses ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang etika dalam penerjemahan: Apakah penerjemah hanya sekadar menyampaikan pesan sesuai teks sumber ataukah memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran di balik retorika hijau yang disajikan?

Konsep *eco-translation* atau penerjemahan ekologi hadir sebagai jawaban atas dilema tersebut. Michael Cronin dalam bukunya "*Eco-translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene*" (2017) menyatakan bahwa penerjemahan tidak bisa dilepaskan dari konteks ekologi. *Eco-translation* menekankan pentingnya sensitivitas ekologis dalam proses penerjemahan, termasuk kesadaran akan bagaimana kata-kata membentuk relasi manusia dengan alam. Dalam konteks penerjemahan laporan keberlanjutan, *eco-translation* mengajak penerjemah untuk tidak sekadar menjadi perantara bahasa, tetapi juga agen perubahan yang kritis terhadap *greenwashing*.

Indonesia memiliki banyak kasus yang relevan untuk dijadikan studi tentang hubungan antara penerjemahan dan *greenwashing*. Misalnya, laporan keberlanjutan dari perusahaan seperti Astra Agro Lestari, Wilmar International, dan Freeport



Indonesia sering kali menyatakan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, tetapi pada saat yang sama, laporan dari organisasi masyarakat sipil seperti WALHI dan Auriga Nusantara menunjukkan bukti adanya pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh entitas yang sama. Di sinilah peran *eco-translation* menjadi sangat penting. Penerjemah yang sadar ekologi tidak hanya menerjemahkan kata per kata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dari teks yang mereka hasilkan.

Laporan keberlanjutan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris memiliki dampak besar terhadap persepsi internasional tentang praktik lingkungan di Indonesia. Investor asing, lembaga donor, dan konsumen global seringkali mengandalkan dokumen-dokumen tersebut untuk menilai apakah sebuah perusahaan layak mendapatkan dukungan finansial atau tidak. Jika terjemahan tersebut mempertahankan narasi yang manipulatif tanpa mempertimbangkan konteks ekologis, maka penerjemah secara tidak langsung berkontribusi pada perpetuasi ketidakadilan ekologis.

Masalah lainnya adalah munculnya istilah-istilah baru dalam ekologi yang seringkali diterjemahkan secara tidak konsisten atau bahkan sengaja dibuat ambigu. Misalnya, istilah "no deforestation" dalam teks Inggris sering diterjemahkan secara literal menjadi "tanpa deforestasi", tetapi dalam praktiknya, perusahaan tetap membuka hutan dengan dalih bahwa hutan tersebut tidak masuk kategori 'High Conservation Value Forest' (HCVF). Perbedaan definisi ini menciptakan ruang bagi manipulasi narasi dalam laporan keberlanjutan.

Begitu pula dengan istilah "carbon offset" yang sering digunakan dalam laporan korporasi. Di satu sisi, istilah ini terdengar positif karena menunjukkan upaya perusahaan



untuk menyeimbangkan emisi karbon yang dihasilkan. Namun, dalam kenyataannya, program offset seringkali digunakan sebagai dalih untuk tetap melanjutkan praktik yang merusak lingkungan dengan membeli kredit karbon dari proyek konservasi lain. Penerjemahan istilah ini menjadi "pengimbangan karbon" atau "kompensasi karbon" seringkali dilakukan tanpa penjelasan memadai tentang implikasi ekologisnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membahas *eco-translation* sebagai disiplin yang tidak hanya membahas aspek linguistik, tetapi juga etika dan politik lingkungan. *Eco-translation* mempersoalkan bagaimana praktik penerjemahan dapat memperkuat atau justru melawan retorika hijau yang menyesatkan. Dalam konteks Indonesia, penerjemahan laporan keberlanjutan menjadi medan penting bagi perebutan wacana tentang siapa yang berhak mendefinisikan apa itu keberlanjutan.

Sejumlah penelitian telah membahas isu *greenwashing* dari perspektif komunikasi dan bisnis, namun kajian tentang peran penerjemahan dalam proses ini masih sangat minim. Lyon dan Montgomery (2015) dalam artikel mereka di jurnal *Organization & Environment* menjelaskan bahwa *greenwashing* tidak hanya soal isi pesan tetapi juga cara penyampaian pesan kepada publik. Jika demikian, penerjemahan menjadi bagian integral dari proses penyebaran narasi hijau tersebut.

Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, bagian dalam ini akan membahas secara mendalam bagaimana praktik *eco-translation* dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengkritisi *greenwashing* dalam komunikasi lingkungan korporasi di Indonesia. Tulisan akan memadukan teori *eco-translation* dengan studi kasus penerjemahan laporan keberlanjutan dari perusahaan-



perusahaan besar di Indonesia, serta membandingkannya dengan data lapangan dari organisasi masyarakat sipil.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam bidang studi penerjemahan di Indonesia, sekaligus memperluas cakupan kajian tentang peran bahasa dan penerjemahan dalam konteks ekologi dan keadilan lingkungan. Selain itu, pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi penerjemah profesional, akademisi, dan mahasiswa dalam menghadapi dilema etika ketika berhadapan dengan teks-teks lingkungan yang berpotensi mengandung *greenwashing*.

## **B. *Greenwashing* dalam Konteks Indonesia**

### **1. Definisi dan dinamika *greenwashing***

*Greenwashing*, atau pencitraan hijau semu, adalah praktik yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesan bahwa mereka berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh aktivis lingkungan Jay Westerveld pada tahun 1986 ketika ia mengkritik industri perhotelan yang mengklaim menjaga lingkungan dengan meminta tamu untuk menggunakan kembali handuk mereka, sembari tetap melakukan praktik yang merusak ekosistem di belakang layar. Sejak saat itu, istilah *greenwashing* menjadi bagian dari diskursus global mengenai etika komunikasi korporasi.

Di Indonesia, *greenwashing* telah menjadi fenomena yang kian masif, terutama sejak meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Konsumen dan investor internasional semakin menuntut transparansi dari perusahaan terkait dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan di sektor ekstraktif dan agribisnis untuk mengadopsi strategi komunikasi berkelanjutan, baik melalui laporan ESG



(*Environmental, Social, and Governance*) maupun kampanye pemasaran yang menonjolkan citra ramah lingkungan.

Namun, realitas di lapangan sering kali bertolak belakang dengan narasi yang dibangun. Dalam laporan "Perizinan yang Menghancurkan: Sisi Gelap Industri Sawit di Indonesia" yang diterbitkan oleh Greenpeace (2021), terungkap bahwa perusahaan-perusahaan besar yang telah berkomitmen pada kebijakan NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*) tetap terlibat dalam pembukaan hutan dan perusakan lahan gambut. Greenpeace mencatat lebih dari 600 ribu hektar hutan yang hilang sejak 2010, meskipun perusahaan telah menyatakan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Wilmar International dan Astra Agro Lestari sering memuat pernyataan tentang komitmen terhadap konservasi dan pengurangan emisi karbon. Akan tetapi, data dari Auriga Nusantara dan WALHI menunjukkan adanya tumpang tindih izin konsesi dengan kawasan hutan lindung dan wilayah adat. Praktik ini menimbulkan konflik agraria dan memperburuk kerusakan lingkungan, namun seringkali tidak tercermin dalam dokumen-dokumen resmi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk konsumsi global.

## **2. Tipe-Tipe *Greenwashing* dalam komunikasi korporasi di Indonesia**

Menurut Delmas dan Burbano (2011), *greenwashing* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, di antaranya adalah *selective disclosure*, yaitu menyajikan informasi lingkungan secara selektif dengan menonjolkan aspek positif dan mengabaikan dampak negatif. Tipe lain adalah *false labeling*, yaitu perusahaan menggunakan sertifikasi atau label hijau yang tidak kredibel atau bersifat manipulatif. Selain itu, ada



juga *misleading language*, yaitu penggunaan bahasa yang ambigu atau hiperbolik untuk menciptakan kesan komitmen terhadap keberlanjutan.

Di Indonesia, tipe-tipe *greenwashing* tersebut sering dijumpai dalam teks laporan keberlanjutan dan materi promosi perusahaan. Misalnya, penggunaan istilah "deforestation-free" yang secara literal diterjemahkan menjadi "bebas deforestasi" sering kali disertai dengan definisi yang longgar, sehingga membuka celah bagi perusahaan untuk tetap membuka hutan yang tidak termasuk dalam kategori HCVF (*High Conservation Value Forest*). Praktik ini memungkinkan perusahaan mengklaim keberlanjutan sambil tetap melakukan konversi lahan secara masif.

Istilah lain yang sering digunakan adalah "carbon neutrality" atau "net-zero emission". Banyak perusahaan di Indonesia mengklaim sedang menuju netralitas karbon melalui program *offset* seperti penanaman pohon atau pembelian kredit karbon. Namun, dalam laporan dari Carbon Market Watch (2022), ditemukan bahwa sebagian besar skema *offset* di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tidak efektif dalam mengurangi emisi secara nyata karena adanya perhitungan ganda atau proyek konservasi yang sebenarnya sudah ada sebelum program *offset* dimulai.

### **3. Peran bahasa dan penerjemahan dalam *greenwashing***

Bahasa adalah alat utama dalam membangun realitas sosial. Dalam konteks *greenwashing*, bahasa menjadi senjata korporasi untuk membentuk persepsi publik tentang keberlanjutan. Di Indonesia proses penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya dalam laporan keberlanjutan sering menjadi medium bagi penguatan dan perpetuasi *greenwashing*.

*Eco-translation* hadir sebagai kritik atas proses penerjemahan yang sekadar mentransfer kata tanpa



mempertimbangkan konteks ekologis dan politik di balik teks tersebut. Ketika penerjemah mengalihbahasakan istilah "penataan lahan" menjadi "land development" tanpa mempertimbangkan bahwa di lapangan proses ini berarti pembabatan hutan primer, maka penerjemah secara tidak langsung berkontribusi pada peredaman isu kerusakan lingkungan.

Hal serupa terjadi dalam penerjemahan istilah "konservasi plasma nutfah" yang kerap diterjemahkan menjadi "germplasm conservation" dalam laporan perusahaan sawit. Dalam banyak kasus, istilah ini digunakan untuk menyebut pembiakan tanaman komersial yang tahan terhadap penyakit, bukan konservasi spesies asli atau endemik. Penerjemahan literal tanpa penjelasan dapat memicu kesalahpahaman yang memperkuat citra hijau perusahaan secara keliru.

Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan jargon teknis dalam laporan keberlanjutan yang sengaja dibuat rumit agar pembaca awam, termasuk penerjemah, kesulitan memahami konteks sebenarnya. Hal ini memperbesar kemungkinan penerjemah sekadar mentransfer istilah tanpa mengkritisi muatan ideologis di balik teks tersebut.

#### **4. Dampak *greenwashing* terhadap keberlanjutan dan keadilan ekologis**

*Greenwashing* bukan hanya soal komunikasi yang menyesatkan. Ia memiliki dampak nyata terhadap keberlanjutan dan keadilan ekologis. Ketika perusahaan berhasil menciptakan citra hijau yang palsu, perusahaan tersebut mendapat akses lebih mudah ke pasar internasional, permodalan, dan legitimasi sosial. Hal itu membuat masyarakat lokal, terutama komunitas adat dan petani kecil, menjadi pihak yang paling dirugikan karena ruang hidup mereka terus tergerus oleh ekspansi industri.



Indonesia memiliki banyak contoh konflik agraria yang berkaitan dengan praktik *greenwashing*. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang 2022 terjadi 212 konflik agraria di Indonesia, dengan 59% di antaranya terkait dengan sektor perkebunan dan kehutanan. Di banyak kasus, perusahaan menggunakan laporan keberlanjutan untuk menutupi dampak sosial dan ekologis dari operasi mereka, sementara konflik di lapangan terus berlanjut.

Dengan demikian, *greenwashing* di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran bahasa dan penerjemahan. *Eco-translation* menawarkan jalan untuk membongkar narasi hijau palsu yang tersebar melalui teks-teks korporasi. Bagian tulisan ini menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana *eco-translation* dapat digunakan sebagai alat kritis untuk melawan praktik *greenwashing* dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam komunikasi lingkungan.

### **C. Eco-Translation sebagai Respons terhadap Greenwashing**

#### **1. Konsep *eco-translation* dan relevansinya dalam konteks Indonesia**

*Eco-translation*, sebagai disiplin yang berkembang dalam studi penerjemahan, menawarkan paradigma baru dalam melihat peran penerjemah dalam konteks ekologi. Michael Cronin dalam bukunya "*Eco-translation: Translation and Ecology in the Age of the Anthropocene*" (2017) menegaskan bahwa penerjemahan tidak bisa dilepaskan dari krisis lingkungan global. *Eco-translation* mengajak penerjemah untuk lebih dari sekadar menyampaikan pesan antarbahasa; ia mendorong penerjemah untuk mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan politik dari teks yang mereka hasilkan.



Di Indonesia, relevansi *eco-translation* semakin nyata ketika kita mengamati praktik penerjemahan laporan keberlanjutan dan dokumen lingkungan lainnya. Banyak perusahaan, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan energi, menerbitkan dokumen *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk konsumsi internasional. Penerjemahan ini menjadi pintu masuk bagi dunia global untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, seperti yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya, terdapat kesenjangan besar antara narasi yang dibangun dalam dokumen tersebut dengan realitas di lapangan. Di sinilah *eco-translation* memiliki peran strategis untuk mencegah atau membongkar praktik *greenwashing* melalui penerjemahan yang lebih etis dan kritis.

## **2. Peran penerjemah dalam mengalihbahasakan teks lingkungan**

Penerjemah sering kali ditempatkan dalam posisi yang kompleks ketika dihadapkan pada teks lingkungan yang bersifat ideologis. Dalam konteks laporan keberlanjutan, penerjemah harus memahami tidak hanya makna literal dari teks tetapi juga konteks sosial, politik, dan ekologis di baliknya.

Sebagai contoh, dalam laporan keberlanjutan Wilmar International tahun 2022, perusahaan ini menyatakan bahwa mereka telah mencapai "100% traceable palm oil supply chain" atau rantai pasok sawit yang 100% dapat dilacak. Dalam versi Bahasa Indonesia, pernyataan ini diterjemahkan secara literal menjadi "rantai pasok minyak sawit yang dapat ditelusuri 100%". Namun, pada kenyataannya, laporan dari Chain Reaction Research (2022) menunjukkan bahwa banyak pemasok Wilmar yang masih terlibat dalam deforestasi, dan



proses pelacakan sering kali hanya sebatas hingga ke pabrik, bukan ke kebun sawit tempat bahan baku dipanen.

Jika penerjemah tidak memahami konteks ini, penerjemahan literal tersebut akan memperkuat narasi hijau yang tidak akurat. *Eco-translation* mengajak penerjemah untuk lebih kritis dengan mungkin menambahkan penjelasan atau catatan tentang batasan pelacakan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

### **3. Strategi *eco-translation* dalam praktik**

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam *eco-translation* untuk menghadapi teks-teks lingkungan yang berpotensi mengandung *greenwashing*:

#### **a. *Transparansi terminologi***

Penerjemah perlu memastikan bahwa istilah-istilah teknis diterjemahkan dengan transparansi makna. Misalnya, istilah "High Carbon Stock Forest" sering diterjemahkan menjadi "Hutan dengan Stok Karbon Tinggi". Namun, banyak perusahaan menggunakan definisi yang sangat sempit untuk kategori ini agar lebih banyak area hutan yang bisa dibuka tanpa dianggap melanggar komitmen 'no deforestation'.

Sebagai solusi, penerjemah bisa menambahkan glosarium atau catatan kaki yang menjelaskan bahwa "Hutan dengan Stok Karbon Tinggi" sering kali didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai pihak, dan bisa saja berbeda dengan definisi ilmiah yang diterima secara luas oleh komunitas konservasi.

#### **b. *Penolakan etis (ethical refusal)***

Dalam kasus tertentu, penerjemah profesional dapat memilih untuk menolak menerjemahkan dokumen yang jelas-jelas manipulatif atau menyesatkan secara ekologis. Misalnya, jika sebuah perusahaan tambang meminta penerjemahan laporan yang menyatakan tidak ada dampak lingkungan dari proyek tambang nikel di Halmahera, padahal berbagai laporan



investigasi menunjukkan adanya kerusakan ekosistem mangrove dan laut, maka penerjemah dapat menolak proyek tersebut.

*Ethical refusal* adalah bagian dari etika profesi yang jarang dibahas dalam konteks penerjemahan komersial, tetapi menjadi sangat relevan dalam *eco-translation*. Penerjemah bukan sekadar penyedia jasa bahasa, melainkan juga agen moral dalam rantai komunikasi.

### **c. Adaptasi kritis**

*Eco-translation* memungkinkan penerjemah untuk melakukan adaptasi kritis, yaitu memilih padanan yang tidak hanya akurat secara linguistik tetapi juga adil secara ekologi. Sebagai contoh, istilah "land bank" sering diterjemahkan menjadi "bank tanah" dalam dokumen perusahaan perkebunan. Padahal, "bank tanah" adalah istilah yang netral dalam konteks perbankan atau agraria, sementara dalam laporan korporasi, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada cadangan lahan yang siap dibuka untuk ekspansi perkebunan.

Dalam konteks *eco-translation*, penerjemah dapat memilih menerjemahkan "land bank" menjadi "cadangan lahan untuk ekspansi perkebunan", agar pembaca memahami konteks ekologis dan dampaknya terhadap lingkungan.

### **d. Penambahan konteks lokal**

Banyak laporan keberlanjutan yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional menggunakan narasi global yang sering kali mengabaikan konteks lokal. Penerjemah yang mengadopsi prinsip *eco-translation* bisa menambahkan konteks lokal dalam teks target, misalnya dengan menambahkan penjelasan tentang dampak langsung kegiatan perusahaan terhadap masyarakat adat atau ekosistem setempat.

Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan tambang menyatakan dalam laporan berbahasa Inggris bahwa perusahaan itu "operating in a sustainable manner",



penerjemah bisa menambahkan dalam versi Bahasa Indonesia bahwa operasi tersebut masih menyisakan konflik dengan masyarakat lokal di sekitar tambang, jika data tersebut tersedia dan relevan.

#### **4. Studi kasus penerapan *eco-translation***

##### **a. Kasus PT Freeport Indonesia**

PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan dalam dua bahasa. Dalam laporan berbahasa Inggris tahun 2021, Freeport menyatakan bahwa mereka "remain committed to sustainable mining practices". Dalam versi Bahasa Indonesia, kalimat ini diterjemahkan menjadi "tetap berkomitmen pada praktik pertambangan berkelanjutan".

Namun, laporan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebutkan bahwa aktivitas tambang Freeport di Papua telah menghasilkan 3 miliar ton *tailing* yang mencemari Sungai Aikwa dan mengubah bentang alam sekitar Timika. Foto-foto satelit yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menunjukkan sedimentasi besar-besaran di wilayah sungai akibat limbah tambang.

Dalam konteks ini, *eco-translation* menuntut penerjemah untuk mempertimbangkan apakah penerjemahan literal tersebut adil bagi masyarakat terdampak. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan menambahkan catatan penerjemah atau glosarium yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan "sustainable mining" dalam versi korporasi dan bagaimana realitasnya di lapangan.

##### **b. Kasus perusahaan kelapa sawit**

Perusahaan-perusahaan sawit seperti Astra Agro Lestari dalam laporan keberlanjutan 2022 menyatakan bahwa mereka "menghormati hak-hak masyarakat adat dan berkomitmen pada prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC)". Dalam



versi Bahasa Inggris, pernyataan ini diterjemahkan dengan sangat formal menjadi "We respect the rights of indigenous peoples and are committed to Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)."

Namun, laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Sawit Watch pada 2022 menunjukkan bahwa di beberapa lokasi konsesi Astra Agro Lestari terjadi konflik agraria dengan masyarakat adat yang lahannya diambil alih tanpa proses FPIC yang memadai.

*Eco-translation* dalam kasus ini dapat digunakan untuk mengkritisi penerjemahan tersebut dengan memperjelas bahwa komitmen FPIC dalam teks korporasi sering kali tidak diikuti dengan implementasi di lapangan. Penerjemah bisa menggunakan pilihan kata yang lebih kontekstual atau menambahkan keterangan tambahan dalam catatan kaki.

### **5. Tantangan dan keterbatasan *eco-translation***

Meskipun *eco-translation* menawarkan solusi etis terhadap *greenwashing*, ada sejumlah tantangan yang dihadapi penerjemah di lapangan.

Pertama, penerjemah sering kali bekerja dalam sistem yang mengutamakan klien sebagai pemegang otoritas utama. Ketika penerjemah dihadapkan pada teks manipulatif, mereka mungkin merasa tidak memiliki kuasa untuk mengubah atau menolak pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi dan profesionalisme.

Kedua, tidak semua penerjemah memiliki latar belakang pengetahuan lingkungan atau ekologi. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk sekadar menerjemahkan secara literal tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dari teks yang mereka terjemahkan.

Ketiga, ada keterbatasan waktu dan akses data. Penerjemah sering bekerja dengan tenggat waktu yang ketat



dan tidak selalu memiliki akses terhadap laporan investigatif atau data lapangan yang bisa digunakan sebagai referensi.

Namun, tantangan ini bukan alasan untuk mengabaikan prinsip *eco-translation*. Justru dengan mengenali batasan ini, komunitas penerjemah bisa mulai membangun ekosistem kerja yang lebih sadar lingkungan, seperti penyusunan glosarium hijau, pelatihan *eco-translation*, dan kolaborasi dengan aktivis lingkungan untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

*Eco-translation* menawarkan pendekatan baru yang relevan dan mendesak dalam menghadapi praktik *greenwashing* di Indonesia. Penerjemahan laporan keberlanjutan dan dokumen lingkungan lainnya tidak bisa lagi dipandang sebagai pekerjaan teknis semata. Ia adalah proses ideologis yang berkontribusi pada pembentukan opini publik tentang ekologi dan keberlanjutan.

Dengan menerapkan prinsip *eco-translation*, penerjemah dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam komunikasi lingkungan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa narasi keberlanjutan yang tersebar di panggung global benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, bukan sekadar retorika hijau yang memanipulasi fakta.

Bagian ini menegaskan bahwa penerjemah memiliki peran strategis dalam memerangi *greenwashing* melalui penerjemahan yang etis, kritis, dan berpihak pada keadilan ekologis.



## **D. Strategi Implementasi *Eco-translation* untuk Melawan *Greenwashing* di Indonesia**

### **1. Kebutuhan mendesak akan praktik penerjemahan yang beretika lingkungan**

Dalam konteks komunikasi lingkungan di Indonesia, kebutuhan akan praktik penerjemahan yang lebih etis dan ekologis bukan sekadar pilihan akademis, melainkan tuntutan moral. Di tengah maraknya *greenwashing*, penerjemahan menjadi garda depan yang menentukan bagaimana narasi keberlanjutan dikonstruksi dan diterima oleh publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Laporan dari Transparency International Indonesia (2022) menyebutkan bahwa sektor ekstraktif di Indonesia masih memiliki masalah serius dalam hal transparansi, terutama terkait dengan perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Data ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak laporan keberlanjutan perusahaan menggunakan istilah-istilah yang ambigu dalam terjemahannya, memperbesar potensi manipulasi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi *eco-translation* yang dapat meminimalkan risiko penerjemahan yang memperkuat *greenwashing*.

### **2. Strategi implementasi *eco-translation***

#### ***a. Penyusunan glosarium hijau berbasis konteks lokal***

Salah satu langkah awal yang penting dalam penerapan *eco-translation* adalah penyusunan glosarium hijau yang mempertimbangkan konteks lokal Indonesia. Banyak istilah lingkungan yang berasal dari bahasa Inggris diadopsi secara langsung tanpa adaptasi yang memadai, sehingga menciptakan ambiguitas.

Sebagai contoh, istilah "sustainable palm oil" sering diterjemahkan menjadi "minyak sawit berkelanjutan". Padahal, definisi keberlanjutan di industri sawit sangat problematik. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), organisasi



sertifikasi sawit berkelanjutan, telah dikritik oleh organisasi seperti Environmental Investigation Agency (EIA) dan Greenpeace karena masih meloloskan perusahaan yang terbukti melakukan deforestasi dan konflik sosial di lapangan.

Glosarium hijau perlu memasukkan definisi yang jelas dan kritis terhadap istilah seperti "sustainable", "net-zero", "carbon offset", "reforestation", dan "deforestation-free supply chain". Glosarium ini harus menyertakan penjelasan tentang potensi bias atau penyempitan makna yang sering terjadi dalam praktik korporasi di Indonesia.

***b. Kolaborasi antara penerjemah dan ahli lingkungan***

*Eco-translation* tidak bisa berdiri sendiri sebagai praktik linguistik. Penerjemah membutuhkan dukungan dari ahli lingkungan, ekologi, dan hukum agraria untuk memahami konteks ekologis dari teks yang diterjemahkan.

Sebagai contoh, dalam penerjemahan dokumen tentang konservasi hutan, penerjemah perlu memahami perbedaan antara "forest restoration" dan "forest rehabilitation". Data dari CIFOR (Center for International Forestry Research) menunjukkan bahwa banyak program rehabilitasi hutan di Indonesia sebenarnya hanyalah penanaman monokultur industri seperti akasia dan eucalyptus yang tidak mendukung keanekaragaman hayati. Penerjemah yang memahami perbedaan ini dapat memilih padanan istilah yang lebih akurat dan tidak menyesatkan.

Kolaborasi lintas disiplin ini juga penting dalam menerjemahkan teks tentang REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*). Proyek REDD+ sering diklaim sebagai solusi untuk pengurangan emisi, tetapi laporan dari Friends of the Earth (2021) menunjukkan bahwa banyak proyek REDD+ di Indonesia melibatkan konflik dengan masyarakat adat yang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan.



### **c. Penerapan catatan penerjemah (translator's notes)**

Dalam konteks *eco-translation*, penggunaan catatan penerjemah menjadi salah satu strategi untuk memberikan transparansi kepada pembaca. Catatan ini bisa berupa penjelasan singkat tentang istilah tertentu yang memiliki konotasi khusus atau berpotensi menyesatkan jika diterjemahkan secara literal.

Sebagai contoh, saat menerjemahkan "carbon offset", penerjemah bisa menambahkan catatan bahwa istilah ini sering digunakan untuk menyeimbangkan emisi dengan pembelian kredit karbon, tetapi tidak selalu berarti pengurangan emisi di lokasi sumber. Hal ini penting agar pembaca tidak terjebak dalam narasi netralitas karbon yang manipulatif.

Catatan penerjemah juga dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan definisi "no deforestation" dalam standar korporasi dibandingkan dengan definisi ekologis yang diakui oleh komunitas ilmiah. Misalnya, banyak perusahaan menggunakan definisi yang mengecualikan hutan sekunder atau hutan yang tidak masuk kategori *High Carbon Stock* (HCS) sebagai hutan yang boleh ditebang, padahal secara ekologis, hutan sekunder juga memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem.

### **d. Penggunaan teknologi korpus berbasis data lapangan**

Penerjemah dapat memanfaatkan teknologi korpus untuk membandingkan penggunaan istilah dalam berbagai dokumen lingkungan. Dengan membangun korpus yang terdiri dari laporan perusahaan, laporan LSM, dan berita investigasi, penerjemah dapat menganalisis kecenderungan penggunaan istilah dan menemukan pola *greenwashing* dalam bahasa.

Sebagai contoh, analisis korpus terhadap laporan keberlanjutan dari 10 perusahaan sawit terbesar di Indonesia menunjukkan bahwa istilah "community empowerment" atau



"pemberdayaan masyarakat" sering digunakan tanpa penjelasan tentang bentuk konkret dari pemberdayaan tersebut. Di sisi lain, laporan dari NGO seperti Sawit Watch atau FWI (Forest Watch Indonesia) sering menyebutkan bahwa pemberdayaan yang dimaksud hanyalah pelatihan bersifat seremonial tanpa perubahan struktural pada hak atas tanah.

Dengan membandingkan dua korpus ini, penerjemah dapat memilih padanan yang lebih akurat atau menambahkan klarifikasi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

#### ***e. Pelatihan eco-translation untuk penerjemah profesional***

Implementasi *eco-translation* memerlukan peningkatan kapasitas penerjemah. Lembaga pendidikan dan asosiasi profesi seperti Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dapat mengadakan pelatihan khusus tentang *eco-translation*, yang mencakup:

- Pengantar ekologi dan isu lingkungan global dan lokal
- Studi kasus *greenwashing* di Indonesia
- Teknik penerjemahan teks lingkungan yang kritis dan beretika

Pelatihan ini dapat mencakup simulasi penerjemahan laporan keberlanjutan yang disertai dengan diskusi tentang etika dan pilihan strategi penerjemahan yang adil secara ekologis.

### **3. Dampak potensial implementasi *eco-translation***

Jika strategi *eco-translation* diterapkan secara luas, dampaknya akan sangat signifikan, baik bagi dunia penerjemahan maupun bagi upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.

Pertama, penerjemah akan memiliki peran baru sebagai penjaga transparansi dalam komunikasi lingkungan. Mereka tidak hanya menjadi perantara bahasa tetapi juga agen yang menjaga agar pesan lingkungan tidak diselewengkan untuk kepentingan citra korporasi.



Kedua, *eco-translation* dapat membantu meningkatkan literasi lingkungan di kalangan penerjemah dan masyarakat luas. Ketika penerjemah memahami dampak ekologi dari teks yang mereka kerjakan, mereka secara otomatis menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar untuk mendorong akuntabilitas korporasi.

Ketiga, penerapan *eco-translation* dapat mempengaruhi kebijakan korporasi. Jika penerjemahan dilakukan secara lebih kritis dan transparan, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyusun narasi keberlanjutan karena tahu bahwa teks mereka tidak akan serta merta diterjemahkan secara literal tanpa kritik.

#### **4. Tantangan dalam implementasi**

Tentu saja, implementasi *eco-translation* tidak lepas dari tantangan. Di antaranya adalah:

- Tekanan dari klien: Banyak penerjemah bekerja dalam sistem yang memprioritaskan kepuasan klien. Jika perusahaan meminta penerjemahan dengan narasi yang sudah dikunci, penerjemah sering merasa tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi.
- Keterbatasan akses informasi: Tidak semua penerjemah memiliki akses ke data lapangan atau laporan investigatif yang bisa digunakan untuk mengkritisi teks sumber.
- Ketidakseimbangan kekuasaan: Penerjemah adalah pihak yang berada di posisi subordinat dalam relasi klien-jasa. Butuh keberanian dan dukungan komunitas untuk melakukan penolakan etis atau adaptasi kritis.

Namun, dengan adanya gerakan kolektif di kalangan penerjemah dan dukungan dari akademisi, LSM, serta organisasi profesi, tantangan ini dapat diatasi secara bertahap.

Strategi implementasi *eco-translation* di Indonesia bukan hanya soal teknik penerjemahan, tetapi soal membangun ekosistem komunikasi yang lebih jujur,



transparan, dan adil terhadap lingkungan. Di tengah krisis ekologi dan maraknya *greenwashing*, penerjemah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa narasi keberlanjutan tidak menjadi sekadar alat pencitraan, melainkan benar-benar mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.

Bagian ini telah memaparkan berbagai strategi praktis yang dapat diterapkan oleh penerjemah, akademisi, dan pelaku industri bahasa untuk mendorong penerjemahan yang lebih bertanggung jawab secara ekologis. Dengan langkah-langkah ini, penerjemah dapat berkontribusi langsung dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.

## **E. Menuju Ekosistem Penerjemahan Yang Berkeadilan Ekologis di Indonesia**

### **1. Urgensi penguatan ekosistem penerjemahan yang berbasis keadilan ekologi**

Krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini bukan sekadar permasalahan ekologis, tetapi juga berkaitan erat dengan krisis komunikasi. Bahasa menjadi alat yang membentuk persepsi publik tentang apa yang disebut sebagai keberlanjutan, konservasi, atau pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam konteks ini, penerjemahan berperan strategis dalam mengalihkan narasi dari satu bahasa ke bahasa lain, sekaligus berpotensi menjadi alat untuk memperkuat atau melawan *greenwashing*.

Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas sekaligus penghasil komoditas global seperti sawit, tambang nikel, dan pulp and paper, menjadi medan pertempuran utama bagi narasi lingkungan. Laporan-laporan keberlanjutan dari perusahaan multinasional, pernyataan tanggung jawab sosial korporasi, serta dokumen terkait investasi hijau hampir selalu diterbitkan dalam dua bahasa: Bahasa Indonesia untuk



konsumsi domestik dan Bahasa Inggris untuk audiens internasional. Dalam proses ini, penerjemah memainkan peran kunci yang sering kali tidak terlihat.

Namun, sejauh ini, ekosistem penerjemahan di Indonesia masih cenderung terjebak dalam model bisnis yang mengutamakan kepentingan klien korporasi di atas pertimbangan etis atau ekologis. Penerjemah umumnya diposisikan sebagai penyedia jasa bahasa yang dituntut untuk akurat secara linguistik, tetapi tidak diberi ruang untuk mengkritisi ideologi teks sumber. Akibatnya, banyak teks yang mengandung unsur *greenwashing* diterjemahkan begitu saja tanpa refleksi kritis, sehingga memperkuat citra perusahaan yang sebenarnya bermasalah secara ekologis.

## **2. Membangun etos kerja penerjemahan berbasis keadilan ekologi**

Untuk membangun ekosistem penerjemahan yang berkeadilan ekologis, perlu dilakukan pergeseran paradigma di kalangan penerjemah, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan pengguna jasa.

### ***a. Pendidikan penerjemahan yang berbasis ekologi***

Kurikulum pendidikan penerjemahan di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek teknis dan linguistik. Aspek etika, apalagi yang terkait dengan ekologi, masih jarang dibahas secara serius. Padahal, seperti yang telah dijelaskan oleh Cronin (2017), dalam era Anthropocene, setiap praktik komunikasi—termasuk penerjemahan—memiliki konsekuensi ekologis.

Program studi penerjemahan di berbagai universitas di Indonesia perlu mulai memasukkan mata kuliah atau modul tentang *eco-translation*, *critical discourse analysis*, dan keadilan lingkungan. Mahasiswa penerjemahan harus diberikan wawasan tentang bagaimana teks lingkungan diproduksi,



didistribusikan, dan berpotensi mempengaruhi kebijakan publik serta nasib masyarakat lokal.

Studi kasus nyata bisa digunakan sebagai materi pembelajaran. Misalnya, menganalisis perbedaan antara laporan keberlanjutan dari perusahaan tambang yang menyebut "reklamasi tambang" sebagai "restorasi ekosistem", padahal faktanya hanya berupa penanaman rumput di atas lahan bekas tambang. Dengan studi kasus seperti ini, mahasiswa akan belajar membaca teks secara kritis dan mempertanyakan narasi resmi.

#### ***b. Penyusunan kode etik penerjemahan lingkungan***

Asosiasi profesi seperti Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) dapat memelopori penyusunan kode etik khusus untuk penerjemahan lingkungan. Kode etik ini bisa mencakup prinsip-prinsip seperti:

- Menolak menerjemahkan teks yang secara jelas menyesatkan publik tentang dampak lingkungan.
- Mendorong transparansi dalam penggunaan istilah teknis ekologi.
- Berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik komunikasi yang merugikan keberlanjutan atau keadilan ekologis.

Kode etik ini akan memberikan landasan moral bagi penerjemah untuk berani mengambil sikap ketika dihadapkan pada teks-teks yang manipulatif.

#### ***c. Membangun komunitas penerjemah sadar ekologi***

Komunitas penerjemah perlu memiliki ruang diskusi tentang isu-isu lingkungan. Forum seperti Jogja Literary Translation Club (JLTC), HPI, atau komunitas daring lainnya bisa menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, studi kasus, dan strategi menghadapi dilema etika dalam penerjemahan.

Komunitas ini juga bisa menjadi penghubung antara penerjemah dengan aktivis lingkungan, akademisi ekologi,



dan jurnalis investigasi. Kolaborasi ini penting agar penerjemah tidak bekerja dalam isolasi, melainkan memiliki akses ke informasi yang lebih komprehensif tentang realitas ekologis di lapangan.

### **3. Peran regulator dan lembaga pengawasan**

Selain dari sisi penerjemah, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga perlu mengawasi narasi lingkungan dalam komunikasi korporasi. OJK, misalnya, telah menerapkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Namun, pengawasan terhadap kebenaran isi laporan keberlanjutan masih minim, terutama dalam aspek bahasa dan terjemahan.

Lembaga pengawasan seperti Komisi Informasi Publik (KIP) atau Ombudsman bisa mulai memperhatikan aspek penerjemahan dalam laporan keberlanjutan. Apakah teks tersebut mengandung informasi yang menyesatkan? Apakah terjemahan memperkuat atau melanggengkan manipulasi data?

### **4. Meningkatkan keterlibatan publik dan literasi lingkungan**

Penerjemahan tidak boleh lagi dilihat sebagai proses tertutup yang hanya melibatkan klien dan penerjemah. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari audiens yang kritis. Oleh karena itu, peningkatan literasi lingkungan menjadi hal yang penting.

Organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace, WALHI, dan Auriga Nusantara dapat membuat versi ringkas dari laporan investigasi mereka dalam bahasa yang mudah diakses, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris, untuk menyeimbangi narasi korporasi. Kolaborasi dengan penerjemah profesional bisa mempercepat penyebaran informasi ini.



Media massa juga perlu memainkan peran sebagai penghubung antara laporan keberlanjutan dengan realitas di lapangan. Jurnalisme data, *fact-checking*, dan analisis wacana kritis bisa menjadi alat untuk membongkar narasi *greenwashing* yang tersebar melalui teks terjemahan.

### **5. Studi perbandingan internasional**

Beberapa negara telah lebih maju dalam mengatur komunikasi lingkungan dan penerjemahan yang beretika. Di Uni Eropa, misalnya, European Green Claims Directive sedang disusun untuk mengatur klaim lingkungan dalam komunikasi bisnis agar tidak menyesatkan konsumen. Salah satu aspek yang diatur adalah kejelasan bahasa dan terjemahan.

Di Kanada, Asosiasi Penerjemah dan Interpreters of Ontario (ATIO) telah memulai diskusi tentang peran penerjemah dalam isu keberlanjutan. Meskipun belum menjadi regulasi resmi, inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk mulai membangun standar serupa.

### **6. Menuju praktik penerjemahan yang transformatif**

Praktik *eco-translation* bukan sekadar teknik penerjemahan baru, melainkan sebuah gerakan yang mendorong transformasi peran penerjemah dari sekadar pengalih bahasa menjadi agen perubahan sosial dan ekologis.

Penerjemah memiliki peluang untuk menjadi bagian dari solusi terhadap krisis lingkungan. Dengan memilih padanan kata yang adil secara ekologis, menolak teks manipulatif, dan bekerja sama dengan komunitas yang lebih luas, penerjemah dapat membantu membangun narasi yang lebih jujur dan berimbang tentang keberlanjutan.

Bagian menegaskan bahwa membangun ekosistem penerjemahan yang berkeadilan ekologis di Indonesia adalah tugas kolektif. Dibutuhkan perubahan paradigma di kalangan penerjemah, akademisi, regulator, dan masyarakat luas agar praktik penerjemahan tidak menjadi alat legitimasi bagi



*greenwashing*, melainkan menjadi jembatan komunikasi yang mendorong transparansi dan keadilan lingkungan.

Dengan langkah-langkah konkret seperti penyusunan glosarium hijau, pendidikan penerjemahan berbasis ekologi, pembentukan kode etik, serta peningkatan literasi publik, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam praktik *eco-translation* yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat terdampak.

Bagian ini sekaligus menjadi panggilan bagi para penerjemah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam membentuk masa depan komunikasi lingkungan yang lebih adil, jujur, dan berkelanjutan.

## **F. Rekomendasi Praktis Untuk Penerjemah, Perusahaan, Dan Pemangku Kepentingan Lainnya**

### **1. Rekomendasi untuk penerjemah**

Penerjemah memiliki peran kunci dalam membentuk narasi lingkungan yang tersebar di ruang publik. Untuk itu, penerjemah perlu mengembangkan kompetensi tidak hanya dalam hal bahasa, tetapi juga dalam pemahaman konteks ekologis dan sosial dari teks yang mereka terjemahkan. Berikut beberapa rekomendasi praktis:

#### ***a. Menerapkan penerjemahan kritis***

Penerjemah perlu melakukan analisis kritis terhadap teks yang diterjemahkan. Sebelum mulai menerjemahkan, lakukan langkah berikut:

- Analisis Konteks: Pahami latar belakang perusahaan atau institusi yang menerbitkan teks. Teliti rekam jejak lingkungan mereka melalui laporan dari organisasi independen seperti WALHI, Greenpeace, atau Mongabay.
- Cek Konsistensi Istilah: Bandingkan istilah yang digunakan dalam laporan keberlanjutan dengan laporan dari LSM atau media independen. Misalnya, jika perusahaan menyebut "pemulihan ekosistem", periksa



apakah yang dimaksud memang rehabilitasi ekologi atau sekadar reklamasi tambang yang minim nilai ekologi.

- Gunakan Catatan Penerjemah: Bila ada istilah yang berpotensi menyesatkan atau ambigu, tambahkan catatan penerjemah. Misalnya, "carbon neutrality" bisa diberi catatan bahwa konsep ini sering kali melibatkan offset yang tidak selalu mengurangi emisi secara nyata.

### ***b. Mengembangkan glosarium hijau dinamis***

Penerjemah perlu membangun glosarium hijau yang selalu diperbarui, dengan memasukkan istilah ekologi terkini berikut konteksnya di Indonesia. Beberapa sumber yang bisa digunakan:

- UNEP Glossary of Environment
- FAO Multilingual Thesaurus
- Kamus Lingkungan WALHI

Glosarium ini sebaiknya mencakup penjelasan tentang risiko bias dalam penerjemahan istilah seperti "sustainable development", "net-zero", dan "green economy".

### ***c. Berani melakukan ethical refusal***

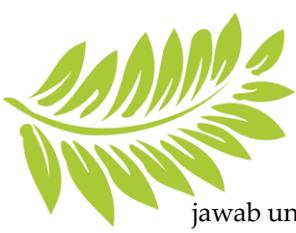
Penerjemah profesional perlu memiliki keberanian untuk menolak proyek yang secara jelas mengandung manipulasi informasi lingkungan. Ethical refusal adalah hak profesional yang sah, terutama bila pekerjaan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan ekologi.

### ***d. Kolaborasi dengan jurnalis dan aktivis lingkungan***

Penerjemah dapat membangun jaringan dengan jurnalis lingkungan dan aktivis agar mendapatkan akses informasi yang lebih luas tentang isu yang sedang diterjemahkan. Dengan demikian, penerjemah tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan terhubung dengan realitas lapangan.

## **2. Rekomendasi untuk perusahaan**

Perusahaan sebagai pihak yang memproduksi laporan keberlanjutan dan dokumen lingkungan memiliki tanggung



jawab untuk memastikan bahwa komunikasi mereka jujur dan transparan, baik dalam bahasa asli maupun dalam terjemahan.

**a. Transparansi dalam penyusunan narasi lingkungan**

Perusahaan perlu menghindari penggunaan istilah yang ambigu atau manipulatif. Alih-alih sekadar menyebut "zero deforestation commitment", perusahaan harus menyertakan definisi operasional yang jelas dan transparan tentang apa yang mereka maksud dengan "deforestasi".

**b. Libatkan penerjemah sejak tahap penyusunan teks**

Penerjemah sebaiknya tidak hanya dilibatkan di akhir proses sebagai tukang alih bahasa, tetapi juga sejak tahap penyusunan narasi. Dengan begitu, penerjemah dapat memberikan masukan tentang bagaimana menyampaikan informasi dengan akurat dan sesuai konteks lintas budaya dan bahasa.

**c. Hindari tekanan terhadap penerjemah untuk memperhalus fakta**

Perusahaan harus memahami bahwa penerjemah bukan alat untuk menghaluskan fakta yang keras menjadi narasi hijau. Biarkan penerjemah bekerja sesuai etika profesional dan kaidah *eco-translation*.

**3. Rekomendasi untuk akademisi dan lembaga pendidikan**

**a. Integrasi *eco-translation* dalam kurikulum**

Program studi penerjemahan di perguruan tinggi perlu memasukkan materi tentang *eco-translation* dalam kurikulumnya. Mahasiswa perlu dilatih untuk memahami:

- Diskursus lingkungan dan keberlanjutan
- Teknik penerjemahan teks lingkungan secara kritis
- Dampak sosial dan ekologis dari pilihan penerjemahan

**b. Riset kolaboratif**

Akademisi dapat melakukan riset kolaboratif dengan LSM, jurnalis, dan komunitas penerjemah untuk menganalisis pola *greenwashing* dalam teks terjemahan yang beredar di Indonesia.



Hasil riset ini dapat menjadi basis advokasi dan perbaikan kebijakan.

#### **4. Rekomendasi untuk regulator dan lembaga pengawas**

##### ***a. Penyusunan standar komunikasi lingkungan***

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu bekerja sama menyusun standar komunikasi lingkungan yang mengatur:

- Bahasa yang jujur dan akurat dalam laporan keberlanjutan
- Pengawasan terhadap terjemahan dokumen lingkungan agar tidak menjadi alat *greenwashing*

##### ***b. Audit bahasa dalam laporan keberlanjutan***

Selain audit keuangan dan lingkungan, perusahaan sebaiknya juga diaudit dari sisi penggunaan bahasa. Apakah istilah yang digunakan sesuai dengan definisi ilmiah atau hanya sekadar retorika pemasaran? Apakah terjemahan mencerminkan realitas atau justru menutupinya?

##### ***c. Sanksi atas klaim lingkungan yang menyesatkan***

Pemerintah perlu menerapkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melakukan *greenwashing*, termasuk dalam komunikasi lintas bahasa. Hal ini sejalan dengan inisiatif di Uni Eropa yang sedang mengembangkan Green Claims Directive untuk memerangi klaim lingkungan yang menyesatkan.

Bagian menyajikan rekomendasi praktis bagi penerjemah, perusahaan, akademisi, regulator, dan masyarakat sipil untuk membangun praktik *eco-translation* yang adil dan transparan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa mencegah penerjemahan menjadi alat propaganda hijau yang menyesatkan, dan sebaliknya, menjadikannya sebagai jembatan komunikasi yang mendorong keberlanjutan sejati.

Rekomendasi ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga etis. Di era krisis iklim dan ekologi, tanggung jawab



komunikasi lintas bahasa adalah tanggung jawab bersama. Penerjemah, sebagai penjaga makna dan nilai, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berpihak pada bumi dan masyarakat.

### **G. Penutup**

Tulisan ini menguraikan secara komprehensif peran strategis *eco-translation* dalam menghadapi fenomena *greenwashing* di Indonesia. Di tengah maraknya laporan keberlanjutan dan komunikasi korporasi yang sering kali mengandung manipulasi narasi, penerjemahan memegang peran ganda: sebagai alat komunikasi dan sebagai penjaga etika informasi lintas bahasa.

Dengan menempatkan *eco-translation* sebagai bagian dari perjuangan untuk keadilan ekologi, penerjemah tidak lagi sekadar menjadi perantara bahasa. Mereka menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada transparansi, kejujuran, dan advokasi lingkungan. Praktik penerjemahan yang kritis terhadap *greenwashing* dapat membantu membongkar retorika hijau yang menyesatkan dan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Keterlibatan berbagai pihak, penerjemah, perusahaan, akademisi, regulator, dan masyarakat sipil, merupakan kunci keberhasilan implementasi *eco-translation* di Indonesia. Pendidikan penerjemahan yang berbasis ekologi, penyusunan glosarium hijau, kode etik penerjemahan lingkungan, hingga regulasi tentang komunikasi lingkungan yang transparan adalah langkah konkret yang dapat dilakukan bersama.

Di era *Anthropocene*, ketika krisis ekologi menjadi kenyataan sehari-hari, tanggung jawab penerjemah meluas dari sekadar menjaga akurasi bahasa menjadi menjaga



kebenaran dan keadilan ekologis. Semoga tulisan ini bisa memberikan kontribusi awal untuk membangun praktik penerjemahan yang lebih beretika, berpihak pada lingkungan, dan mendukung keberlanjutan yang sesungguhnya.

### Daftar Pustaka

- Auriga Nusantara. (2021). *Laporan Industri Ekstraktif dan Deforestasi*. Auriga Nusantara. <https://auriga.or.id/publikasi>
- Carbon Market Watch. (2022). *Corporate climate responsibility monitor 2022*. <https://carbonmarketwatch.org/publications/corporate-climate-responsibility-monitor-2022/>
- Chain Reaction Research. (2022). *Palm oil supply chain monitoring*. <https://chainreactionresearch.com>
- Chesterman, A. (2001). *Ethics of translation*. Routledge.
- Cronin, M. (2017). *Eco-translation: Translation and ecology in the age of the Anthropocene*. Routledge.
- Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2011). The drivers of greenwashing. *California Management Review*, 54(1), 64–87. <https://doi.org/10.1525/cmr.2011.54.1.64>
- Environmental Investigation Agency. (2020). *Who watches the watchmen? Auditors and the breakdown of oversight in the RSPO*. <https://eia-international.org/report/who-watches-the-watchmen/>
- FAO. (2021). *FAO multilingual thesaurus of terms*. <https://www.fao.org/faoterm/en/>
- Friends of the Earth. (2021). *REDD+ projects and land rights in Southeast Asia*. <https://foe.org/redd-land-rights>
- Greenpeace. (2021). *Licence to clear: The dark side of permitting in Indonesia's palm oil sector*. <https://www.greenpeace.org/international/publication/43747/licence-to-clear/>
- Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (2022). *Dampak pertambangan di Papua*. <https://www.jatam.org>
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (2022). *Catatan akhir tahun konflik agraria 2022*. <https://kpa.or.id>
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. *Organization & Environment*, 28(2), 223–249. <https://doi.org/10.1177/1086026615575332>
- Mongabay Indonesia. (2022). *Liputan investigasi deforestasi dan konflik lahan*. <https://www.mongabay.co.id>



- Setiajid, H. H. (2025, Juli 15). Menjaga bahasa, menjaga bumi: Greenwashing dan tantangan eco-translation di Indonesia. *JLTC*.  
<https://www.jltc.live>
- Transparency International Indonesia. (2022). *Korupsi dalam sektor ekstraktif*.  
<https://ti.or.id>
- UNEP. (2021). *Glossary of environmental terms*. United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2022). *Krisis ekologis di Indonesia: Laporan tahunan WALHI*. <https://www.walhi.or.id>.

# **BIONARASI PENULIS**







### **Almira Ghassani Shabrina Romala**

Almira Ghassani Shabrina Romala merupakan dosen Program Studi Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Selain mengampu mata kuliah di bidang penerjemahan, ia telah menulis buku ajar berjudul *Translations We Live By: Exploring Theories and Practices of Translation* (2021). Ia juga memiliki minat penelitian yang berfokus pada penerjemahan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris, khususnya dalam aspek budaya. Pada tahun 2024, ia terpilih menjadi salah satu penerjemah buku cerita anak Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, ia terpilih menjadi salah satu peserta Laboratorium Penerjemah Sastra di bawah Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025. Di luar aktivitas akademik, ia aktif sebagai CEO Jogja Literary Translation Club (JLTC), sebuah komunitas penerjemah berbasis di Yogyakarta yang kini telah menjadi badan hukum dan memiliki anggota dari berbagai wilayah di Indonesia. Almira dapat dihubungi melalui surel [almiraromala@usd.ac.id](mailto:almiraromala@usd.ac.id) atau di media sosial dengan nama pengguna @almiraromala.



### **Adventina Putranti**

Adventina Putranti adalah pengajar di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Gelar Magister humaniora dalam bidang linguistik penerjemahan diperoleh dari Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Matakuliah yang diampu adalah *Semantics-Pragmatics, Translation, dan Interpreting*. Minat penelitiannya mencakup topik-topik sekitar penerjemahan lisan maupun tulis, dan fenomena bahasa dengan pendekatan semantik dan pragmatik. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel [adventinaputranti@gmail.com](mailto:adventinaputranti@gmail.com).



### **Harris Hermansyah Setiajid**

Adalah seorang penerjemah, penulis, dan pengajar di bidang *Translation Studies*. Ia mengabdikan sebagian besar waktunya untuk mendampingi mahasiswa, menerjemahkan karya sastra, serta meneliti isu-isu lintas disiplin dalam penerjemahan, termasuk ekologi, etika, dan keadilan sosial. Sebelumnya, ia menempuh studi doktoral di bidang *Translation Studies* di Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Namun, karena pertimbangan pribadi dan perjalanan hidup yang tak terduga, ia memilih mengakhiri studi tersebut sebelum tahap disertasi. Bagi Harris, keputusan tersebut bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan transformasi jalan



intelektual menuju ruang-ruang di luar batas akademik formal. Sebagai praktisi dan pemikir independen, Harris terus aktif menulis, menerjemahkan, dan berbagi pengetahuan melalui komunitas penerjemahan yang ia inisiasi. Ia percaya bahwa penerjemahan adalah kerja lintas batas yang tidak sekadar memindahkan bahasa, tetapi juga membangun jembatan pemahaman antarmanusia, budaya, dan semesta. Melalui tulisan dan kegiatannya, ia berupaya merawat ekosistem penerjemahan yang lebih inklusif dan reflektif, di mana proses belajar dan berkarya tetap berjalan meskipun tidak selalu melalui jalur konvensional. Harris dapat dihubungi melalui [harris@usd.ac.id](mailto:harris@usd.ac.id)



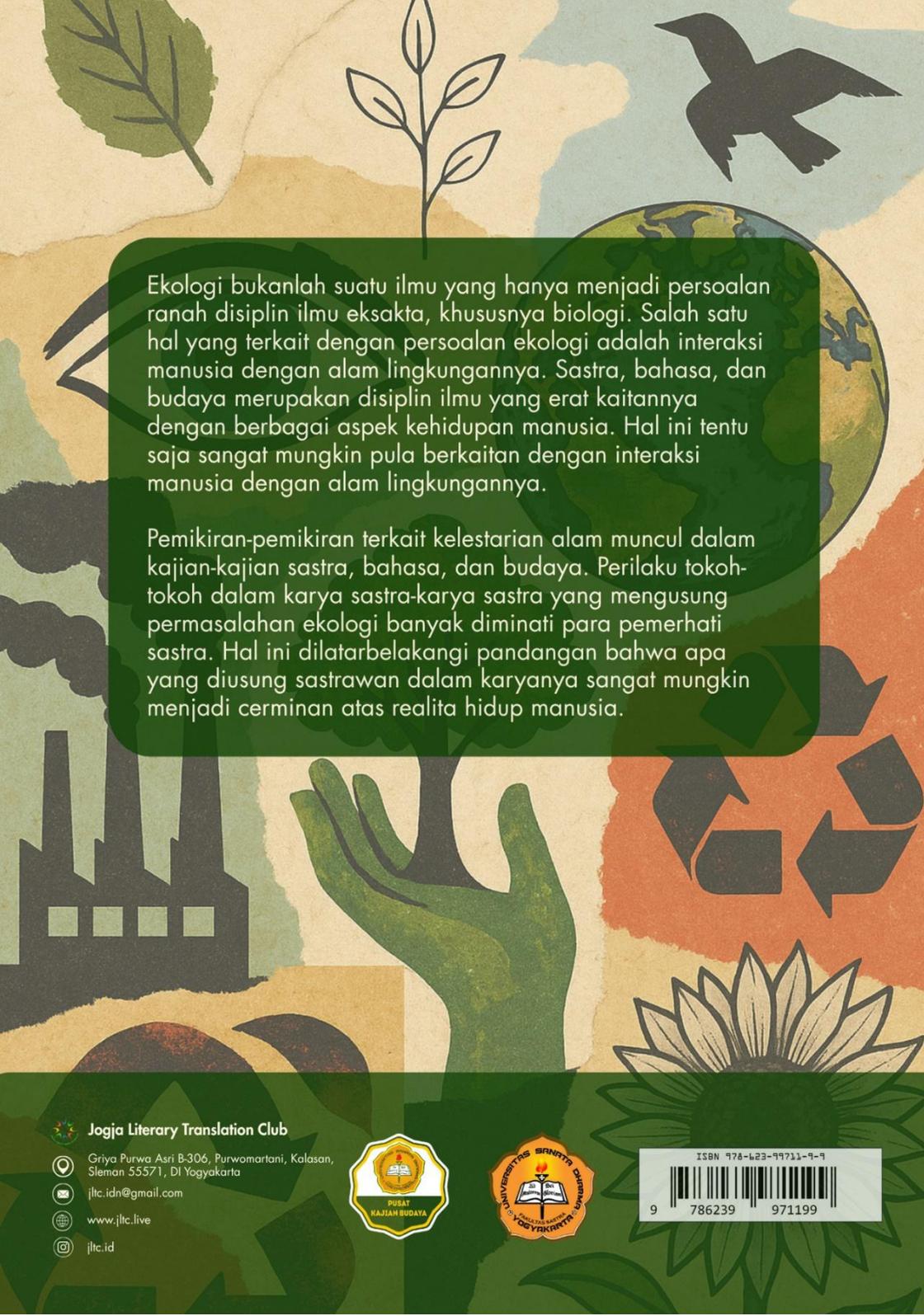
### **Anindita Dewangga Puri**

Anindita Dewangga Puri adalah dosen tetap di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Anindita memperoleh gelar sarjana dari Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma dan gelar master di bidang Linguistik dari Universitas Gadjah Mada. Minat penelitiannya di bidang Linguistik meliputi Pragmatik, Analisis Wacana, Bahasa dan Humor, Bahasa dan AI dalam Pendidikan. Beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan meliputi *Analysis of Humor on Cartoon Comics "Be Like Bro": Pragmatics Study*; *Nature in Indonesian Tourism: A Multimodal Discourse Analysis*; *The Function of Humor Applied in Margaret Cho's Stand-Up Comedy: Psycho*; *Exploring The Use of Generative AI in Student-Produced EFL Podcasts: A Qualitative Study*. Alamat surel yang dapat dihubungi: [aninditapuri@usd.ac.id](mailto:aninditapuri@usd.ac.id).



### **Arina Isti'annah**

Arina Isti'annah merupakan seorang dosen linguistik pada program studi Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma. Ia menempuh Pendidikan sarjana dan magister di Universitas Sanata Dharma, dan mendapatkan gelar doktoral di bidang linguistik dari Universitas Gadjah Mada. Ia memiliki ketertarikan riset pada bidang ekolinguistik dan analisis wacana berbantuan korpus. Publikasi terkini antara lain berjudul *"Infrastructure discourse in Indonesian mass media"* yang diterbitkan oleh jurnal *World of Media* (Scopus Q1) dan *"Korean loanwords in Indonesian"* oleh jurnal *Wacana* (Scopus Q2). Beberapa artikel lain telah diterima di jurnal internasional, diantaranya oleh *Kasetsart Journal of Social Sciences* (Scopus Q3) yang membahas *"Perubahan Iklim dalam media massa di Indonesia"* dan *Jordan Journal of Modern Languages* (Scopus Q1) tentang *"Metafora dalam promosi pariwisata Indonesia"*. Kedua artikel tersebut



Ekologi bukanlah suatu ilmu yang hanya menjadi persoalan ranah disiplin ilmu eksakta, khususnya biologi. Salah satu hal yang terkait dengan persoalan ekologi adalah interaksi manusia dengan alam lingkungannya. Sastra, bahasa, dan budaya merupakan disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini tentu saja sangat mungkin pula berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam lingkungannya.

Pemikiran-pemikiran terkait kelestarian alam muncul dalam kajian-kajian sastra, bahasa, dan budaya. Perilaku tokoh-tokoh dalam karya sastra-karya sastra yang mengusung permasalahan ekologi banyak diminati para pemerhati sastra. Hal ini dilatarbelakangi pandangan bahwa apa yang diusung sastrawan dalam karyanya sangat mungkin menjadi cerminan atas realita hidup manusia.



**Jogja Literary Translation Club**



Griya Purwa Asri B-306, Purwomartani, Kalasan,  
Sleman 55571, Di Yogyakarta



jltc.idh@gmail.com



www.jltc.live



jltc.id



ISBN 978-623-99711-9-9



9

786239

971199